

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia ditandai dengan adanya pertentangan serta konflik politik dalam menentukan bentuk negara Indonesia. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, di sisi lain muncul gerakan menentang dibentuknya negara federal. Gerakan tersebut tidak hanya berasal dari kalangan elit politik saja, akan tetapi berkembang pula dari kalangan masyarakat bawah yang menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi negara kesatuan (Ricklefs, 2009, hlm. 503).

Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan dari Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan sistem negara federalnya menjadi negara kesatuan dengan sistem parlementer multi partai. Dengan sistem tersebut maka kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen atau majelis (Marbun, 2003, hlm. 116). Perubahan tersebut berdampak pada dihapuskannya struktur konstitusional sistem federal yang sebelumnya digunakan yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik Indonesia (RI), serta negara-negara bagian sebagai unsur di dalamnya digantikan oleh Republik Indonesia yang baru yang memiliki konstitusi kesatuan (namun bersifat sementara) dan Jakarta dipilih sebagai Ibu Kota (Ricklefs, 2009, hlm. 489-490). Pada masa ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada rakyat tanpa pembatasan dan persyaratan yang tegas dalam melakukan kegiatan politik, sehingga berakibat semakin banyak partai yang bermunculan.

Akan tetapi percobaan demokrasi pertama ini telah mengalami kegagalan, korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah negara terancam, keadilan sosial belum tercapai, masalah-masalah ekonomi belum terpecahkan, dan banyak harapan yang ditimbulkan dari revolusi belum terwujud (Ricklefs, 2009, hlm. 493). Persaingan partai politik di Indonesia pada saat itu sangat jelas terasa. Mereka berlomba untuk mencapai cita-cita dengan tujuan politiknya yang memicu jatuh banggunya kabinet pada masa Demokrasi Liberal tersebut.

Kemudian Subandi (2017) mengemukakan pendapatnya mengenai penerapan Demokrasi Liberal yaitu bahwa

Demokrasi dimasa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Namun demikian model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia, dengan alasan karena lemahnya budaya demokrasi masyarakat Indonesia untuk mempraktekkan demokrasi model barat (hlm. 124).

Sejalan dengan pendapat Subandi, Purnaweni (2004) juga mengamati bahwa penerapan Demokrasi Liberal tersebut bertentangan dengan budaya Indonesia, ia mengatakan bahwa

Kegagalan praktek pembumian Demokrasi Liberal dan parlementer lalu direduksi sebagai kegagalan penerapan demokrasi ala barat yang bertentangan dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Nampaknya sengaja diabaikan kenyataan bahwa kegagalan penerapan demokrasi ala barat tersebut sesungguhnya lebih disebabkan oleh rapuhnya bangunan sistem politik yang berpijak pada ideologi-kultural dan kerosaknya sistem ekonomi saat itu (hlm. 120).

Kemudian Subandi (2017) mengemukakan dampak dari diterapkannya Demokrasi Liberal yang dianggap tidak mewakili aspek budaya Indonesia. Seperti halnya yang ia kemukakan bahwa

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masanya jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat mudah pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat telah mengancam berjalanya demokrasi itu sendiri (hlm. 124).

Pada masa Demokrasi Liberal sampai berakhirnya UUDS 1950, terhitung sudah 7 kali pergantian kabinet yang berkuasa di Indonesia. Kabinet tersebut yaitu Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April

Aldi Maulana, 2018

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO DI INDONESIA TAHUN 1952-1953

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

1952- Juli 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-1955), Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-1957), dan Kabinet Juanda (1957-1959) (Zulkarnaen, 2012, hlm. 104). Ketujuh kabinet tersebut bergantian menduduki kursi pemerintahan hanya dalam kurun waktu sekitar sembilan tahun.

Jatuh banggunya kabinet pada masa Demokrasi Liberal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkajinya, Dalam hal ini, penulis akan mengkaji mengenai Kabinet Wilopo. Tokoh Wilopo merupakan salah satu tokoh penting dalam proses pembangunan nasional Indonesia, akan tetapi tidak begitu banyak orang yang mengetahui tentang tokoh tersebut, baik secara pribadi maupun perannya dalam bernegara. Terlebih banyak peristiwa penting yang terjadi pada masa Kabinet Wilopo yang membuat penulis tertarik untuk mendalaminya yaitu seperti peristiwa 17 Oktober 1952, penyusunan UU pemilu, kebijakan ekonomi benteng, serta kebijakan yang lainnya.

Kondisi politik Indonesia yang tidak stabil seperti jatuhnya banggunya kabinet membuat Indonesia kembali mengalami krisis pemerintahan. karena dengan tidak dapat bertahan lamanya usia kabinet, tentu akan sulit untuk merealisasikan program kerja kabinet yang telah direncanakan. Adapun salah satu faktor penyebab jatuhnya setiap kabinet yaitu karena terdapat banyak partai politik dengan memiliki sikap yang berbeda sehingga seringkali memunculkan perdebatan, kemudian ditambah dengan suara mayoritas di parlemen berasal dari partai Masyumi dan PNI. Sehingga dalam pembentukan kabinet yang kuat perlu dukungan dari kedua partai tersebut di parlemen (Marbun, 2003, hlm. 171). Seperti halnya dalam pembentukan kabinet baru setelah jatuhnya Kabinet Sukiman, maka Presiden Soekarno menunjuk Sidik djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) sebagai formatur untuk membentuk susunan kabinet. Namun pembentukan kabinet tidak berjalan dengan baik karena kurang mendapat dukungan dari parlemen. Sehingga pada tanggal 19 maret 1952, Wilopo ditunjuk sebagai formatur baru. Dalam waktu yang relatif singkat, Wilopo dapat menyampaikan nama-nama anggota kabinet baru pada tanggal 30 Maret 1952 kepada Presiden Soekarno. Susunan kabinet tersebut mendapat dukungan besar dari parlemen dan kemudian disetujui oleh presiden. Secara resmi Kabinet Wilopo disahkan pada tanggal 4 April 1952 (Soebagijo dkk. 1979, hlm. 113).

Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga pada periode Demokrasi Liberal di Indonesia. Kabinet tersebut dihadapkan pada **Aldi Maulana, 2018**

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO DI INDONESIA TAHUN 1952-1953

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

persoalan di bidang ekonomi, politik, perburuhan serta pertahanan dan keamanan yang harus segera diselesaikan. Di bidang ekonomi, persoalan muncul yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang tidak stabil, terutama setelah berakhirnya perang Korea. Karena antara bulan Februari 1951 dan September 1952, harga karet ekspor nasional turun 71%. Hal tersebut berdampak pada jumlah pendapatan negara. Karena pendapatan utama negara waktu itu berasal dari hasil ekspor dan impor (Ricklefs, 2009, hlm. 509).

Permasalahan di bidang politik ditandai dengan keinginan dari berbagai lapisan masyarakat untuk menyelenggarakan pemilihan umum, hal tersebut dapat dipahami bahwa mereka yang berada di parlemen bukan hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat. Program kerja pada kabinet sebelumnya mencantumkan pemilihan umum sebagai program utama kabinet, akan tetapi belum ada yang dapat merealisasikannya. Maka dari itu, Kabinet Wilopo menempatkan persiapan penyelenggaraan pemilu sebagai program utama yang harus direalisasikan. Pada tanggal 1 April 1953 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akhirnya berhasil diselesaikan dengan menghasilkan UU No. 7 tahun 1953 dan disahkan pada tanggal 4 April 1953 (Wilopo, 1976, hlm. 32).

Selain kebijakan politik dalam negeri, kebijakan politik luar negeri juga menjadi perhatian khusus Kabinet Wilopo yaitu untuk memperbaiki citra Indonesia dimata dunia terutama setelah disepakatinya kerjasama bantuan militer dengan Amerika Serikat yaitu *Mutual Security Act* (MSA). Kerjasama tersebut dianggap sebagai salah satu sikap memihaknya Indonesia terhadap salah satu blok yang sedang berselisih pada waktu itu. Adapun Soebagijo dkk (1979, hlm. 124) mengemukakan bahwa salah satu program politik luar negeri yang tertera dalam Program Kabinet Wilopo yaitu “mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktifitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.”

Persoalan di bidang pertahanan dan keamanan, ditandai dengan tidak harmonisnya hubungan sipil dan militer, puncaknya terjadi pada peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut merupakan konflik elit politik dalam perebutan yurisdiksional antara parlemen dengan Kementerian Pertahanan, yang secara garis besar memuat mengenai sikap anti-Parlemen (Compton, 1992, hlm. 4). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya mosi tidak percaya dari Kol. Bambang Supeno terhadap kebijakan menteri pertahanan dan pimpinan Angkatan Darat tentang pengurangan personil tentara. Kemudian mosi tersebut dibahas dan

Aldi Maulana, 2018

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO DI INDONESIA TAHUN 1952-1953

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

diperdebatkan di dalam parlemen (Ricklefs, 2009, hlm. 509-510). Perdebatan tersebut memunculkan reaksi dari pimpinan Angkatan Darat yang dianggap sebagai bentuk intervensi pihak sipil terhadap permasalahan internal militer (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010, hlm. 312).

Permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia seperti yang telah dipaparkan diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kabinet Wilopo dengan mengambil judul penelitian “Kebijakan-kebijakan pada Masa Pemerintahan Kabinet Wilopo di Indonesia Tahun 1952-1953”. Penulis merasa ingin mengetahui bagaimana Kabinet Wilopo menyelesaikan permasalahan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dalam bidang ekonomi, politik, perburuhan serta pertahanan dan keamanan pada tahun 1952-1953.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam kajian penelitian mengenai bagaimana Kebijakan-kebijakan pada Masa Pemerintahan Kabinet Wilopo di Indonesia Tahun 1952-1953? Beberapa rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Wilopo yang mempengaruhi perjalanan politiknya hingga menjadi Perdana Menteri?
2. Bagaimana proses terbentuknya Kabinet Wilopo?
3. Apa program kerja Kabinet Wilopo?
4. Bagaimana kondisi Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, perburuhan, serta bidang pertahanan dan keamanan pada masa Kabinet Wilopo tahun 1952-1953?
5. Bagaimana akhir pemerintahan Kabinet Wilopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan latar belakang kehidupan Wilopo yang mempengaruhi perjalanan politiknya hingga menjadi Perdana Menteri.
2. Menjelaskan proses terbentuknya Kabinet Wilopo.
3. Menganalisis program kerja Kabinet Wilopo.

Aldi Maulana, 2018

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO DI INDONESIA TAHUN 1952-1953

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

4. Menganalisis kondisi Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, perburuhan serta bidang pertahanan dan keamanan pada masa Kabinet Wilopo tahun 1952-1953.
5. Menjelaskan akhir pemerintahan Kabinet Wilopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Menambah khasanah penulisan sejarah nasional khususnya sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan keilmuan, umumnya dalam materi Sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal, khususnya pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo tahun 1952-1953.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi skripsi ini dibagi ke dalam lima bab. Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, tujuan, manfaat, dan struktur organisasi skripsi. Kemudian pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan tersebut diuraikan guna mempermudah penulis untuk menganalisisnya di bab IV.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini memaparkan sumber-sumber yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang akan digunakan di bab IV. Adapun sumber-sumber yang digunakan yaitu berupa jurnal, skripsi, buku-buku, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kajian penulis. Tinjauan sumber tersebut dilakukan guna mempermudah penulis dalam memetakan bagian-bagian bahasan dalam bab IV.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan oleh penulis, baik berupa metode penulisan ataupun teknik penelitian yang menjadi dasar serta landasan penulis dalam mencari sumber-sumber yang kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

Bab IV Pemerintahan Kabinet Wilopo Tahun 1952-1953. Bab ini merupakan bagian inti atau utama pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Bab ini juga akan menjawab beberapa rumusan pertanyaan yang dipaparkan pada bab I. Kemudian bab IV juga memiliki hubungan dengan bab sebelumnya menyangkut rancangan kajian pustaka, metode

Aldi Maulana, 2018

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO DI INDONESIA TAHUN 1952-1953

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

penelitian yang telah di tentukan. Karena untuk menjawab rumusan masalah, penting untuk memperhatikan kajian pustaka serta metode yang akan digunakan.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan karya ilmiah yang berisi simpulan dari penulis sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga penulis memaparkan hasil analisis pada pembahasan yang dijelaskan pada bab IV yang menggambarkan Kebijakan-kebijakan pada Masa Pemerintahan Kabinet Wilopo di Indonesia pada tahun 1952-1953.

Aldi Maulana, 2018

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO DI INDONESIA TAHUN 1952-1953

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu